



Respon Terhadap Kebijakan Publik Sebagai Strategi Efektif Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi di Seluruh Negara

Achmad Widodo^{1*}, Izzuni Khoirun Nissa²

¹⁻²Institut Islam Mamba'ul'ulum Surakarta, Indonesia

Alamat : Jl. Sadewa No. 14 Serengan Surakarta 57155

Korespondensi penulis:edo9680@gmail.com*

Abstract. The development of Indonesia's labor productivity has shown a positive trend in recent years. Between 2018 and 2022, productivity increased by 4.8%, reaching its highest level in 2022 at IDR 86.55 million per worker per year. Indonesia's vast marine and fisheries potential serves as a significant asset in driving economic growth. The country's Gross Domestic Product (GDP) in 2025 is projected to grow between 4.9% and 5%, primarily supported by targeted public spending and increased investment in various strategic sectors. In 2024, the total number of jobs is expected to reach 144.64 million, accompanied by the creation of new employment opportunities that contribute to reducing unemployment. The Human Development Index (HDI) also shows improvement, rising from 71.92 in 2023 to a targeted 72.51 in 2025, reflecting better education, health, and living standards. The Gini ratio, which measures income inequality, is expected to decline to 0.380 by the end of 2024, indicating progress toward equitable income distribution. In terms of healthcare services, BPJS Kesehatan allocation data in 2024 recorded 102.8 million available data samples, illustrating broad healthcare coverage for the population. On the fiscal side, total tax revenues in the 2024 State Budget (APBN) are projected at IDR 2,309.86 trillion, with current realizations of around IDR 869.50 trillion. Tax revenues, including income tax and value-added tax, have shown a consistent upward trend over recent years. Meanwhile, state expenditures are estimated to reach IDR 3,325.12 trillion, expected to support equitable and sustainable national development.

Keywords: Economic Equality; Government Policy; Welfare.

Abstrak. Perkembangan produktivitas tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada periode 2018–2022 produktivitas meningkat sebesar 4,8% dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 mencapai Rp86,55 juta per pekerja per tahun. Potensi kelautan dan perikanan yang besar menjadi salah satu modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,9% hingga 5%, yang didorong oleh belanja publik yang terarah serta peningkatan investasi di berbagai sektor strategis. Pada tahun 2024, jumlah lapangan kerja diperkirakan mencapai 144,64 juta orang dengan pertumbuhan lapangan kerja baru yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 71,92 pada tahun 2023 menjadi target 72,51 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Rasio Gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, menurun menjadi 0,380 pada akhir tahun 2024, menunjukkan peningkatan pemerataan pendapatan. Dari sisi pelayanan kesehatan, data alokasi BPJS Kesehatan pada tahun 2024 mencatat 102,8 juta data sampel yang tersedia, mencerminkan cakupan layanan kesehatan yang luas. Sementara itu, dari sisi fiskal, total penerimaan pajak dalam APBN 2024 diperkirakan mencapai Rp2.309,86 triliun dengan realisasi sementara sebesar Rp869,50 triliun, di mana penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.325,12 triliun yang diharapkan mampu mendukung pemerataan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah; Kesejahteraan; Kesetaraan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Realisasi Investasi Nasional 2024 Total realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun (sekitar US\$ 105,13 miliar), meningkat 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) melonjak signifikan, dari US\$ 764 juta

pada tahun 2023 menjadi US\$ 2,48 miliar pada tahun 2024, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga meningkat dari Rp8,85 triliun menjadi Rp10,01 triliun. Pertumbuhan investasi mencapai 134,38% pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Triwulan ke-3 dan ke-4 tahun 2024 mencatat lonjakan investasi masing-masing sebesar 272,9% dan 538,8% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor asing. Investasi Berdasarkan Sumber dan Sektor, Singapura merupakan sumber investasi langsung asing (FDI) terbesar di Indonesia, diikuti oleh Hong Kong dan Tiongkok. Sektor pertambangan dan pengolahan mineral merupakan salah satu penerima manfaat utama FDI, terutama setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mendorong investasi pada rantai pasok kendaraan listrik. Industri logam dasar, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, dan pertambangan merupakan sektor utama yang menarik investasi asing. Tren investasi domestik menunjukkan tren yang stabil dengan pertumbuhan yang signifikan pada kuartal pertama, kedua, dan keempat tahun 2024, meskipun terjadi sedikit penurunan pada kuartal tersebut. Peningkatan investasi domestik didorong oleh percepatan proyek infrastruktur, insentif bagi pelaku usaha lokal, dan stabilitas makroekonomi. (BPS, 2024).

Pemerataan ekonomi berkaitan erat dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan pendapatan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Beberapa poin utama yang menjadi latar belakang pemerataan ekonomi ialah ketimpangan pembangunan dan pendapatan yang terjadi antar daerah, di mana daerah maju tumbuh lebih cepat dibanding daerah tertinggal, menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup lebar. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dan dampak negatif bagi pertumbuhan daerah yang kurang berkembang. Pemerataan ekonomi penting untuk menciptakan kesatuan bangsa melalui hubungan yang serasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola potensi daerahnya demi mendorong pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Ketidakmerataan pendapatan disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi, alokasi investasi yang tidak merata, rendahnya mobilitas faktor produksi antar daerah, perbedaan sumber daya alam, kondisi geografis, dan perdagangan antar daerah yang kurang lancar. (Kuncoro, 2010).

Meratanya investasi di seluruh daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Pemerataan ekonomi merupakan upaya memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan, sandang, pangan, dan papan secara adil. Kebijakan pemerataan ekonomi didasarkan pada tiga pilar utama yaitu pengelolaan lahan, kesempatan kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang saling memperkuat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Pemerataan pembangunan

ekonomi juga penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh daerah, termasuk daerah tertinggal dan terpencil. (Alifah, 2023)

Kebijakan fiskal ini berperan sebagai stimulus ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, misalnya melalui subsidi, yang dapat mendorong investasi dan output ekonomi. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi siklus bisnis dengan mengubah penerimaan (pajak) dan pengeluaran pemerintah agar pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Filosofi kebijakan fiskal didasari oleh teori keynes yang menekankan perlunya campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai kondisi full employment karena pasar bebas tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara otomatis. Dalam pandangan Keynes, pengeluaran pemerintah dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan pengangguran. Melalui kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan variabel moneter lainnya seperti suku bunga dan kredit guna mencapai tujuan ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan mendukung sektor riil melalui pengaruhnya pada sektor perbankan dan kegiatan ekonomi secara luas. Kebijakan moneter digunakan sebagai alat stabilisasi ekonomi ketika terjadi gangguan dalam perekonomian, misalnya inflasi yang tinggi atau ketidakseimbangan neraca pembayaran. Dengan mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, bank sentral berupaya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesempatan kerja penuh (Alma'ruf, 2023).

Indikator Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain Kemiskinan: Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,36%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,90 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dari September 2022 yang sebesar 9,57% dan lebih rendah dibandingkan angka prapandemi Maret 2019 sebesar 9,41%. Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 7,0%-8,0% pada tahun 2025 melalui berbagai program bantuan sosial dan peningkatan lapangan kerja. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini): Rasio Gini pada tahun 2023 adalah 0,388. Pemerintah menargetkan penurunan rasio ini menjadi sekitar 0,379-0,382 pada 2025, sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Pada 2023, TPT sebesar 5,32%, dengan target penurunan menjadi 4,5%-5,0% pada 2025 melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi serta penciptaan lapangan kerja baru. Indeks Modal Manusia (Human Capital Index): Pemerintah menargetkan indeks ini

mencapai 0,56 pada 2025, sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. (Andina, 2024).

Nilai Tukar Petani dan Nelayan (NTP dan NTN): NTP pada 2023 sebesar 112,46 dengan target naik kembali ke kisaran 113-115 pada 2025, sedangkan NTN pada 2023 sebesar 105,4 dengan target sedikit menurun menjadi 104-105 pada 2025. Ini mencerminkan upaya peningkatan produktivitas dan stabilisasi harga komoditas pertanian dan perikanan. Delapan Indikator Kesejahteraan: Selain kemiskinan dan pengangguran, kesejahteraan juga diukur dari indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta aspek sosial lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menunjukkan perkembangan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik. (Saragih, 2022).

Kebijakan dan Program Pemerintah. Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan dalam APBN 2025 untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pasca pandemi COVID-19. Program bantuan sosial (bansos) tahun 2025 menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terbaru untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan. Fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan investasi pada sektor ramah lingkungan dan teknologi digital diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaru dan tren dalam beberapa tahun terakhir. Pengaruh kebijakan ini membuktikan tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen secara tahunan (year on year), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 2023 yang sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan ini juga berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2 persen.

Secara historis, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir (2000-2024) adalah sekitar 4,89 persen, dengan puncak tertinggi 7,16 persen pada kuartal IV 2004 dan terendah -5,32 persen pada kuartal II 2020 saat pandemi Covid-19. Sektor produksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2024 antara lain jasa lainnya (9,80%), transportasi dan pergudangan (8,69%), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56%). Industri pengolahan yang dominan tumbuh 4,43 persen, sementara perdagangan besar dan eceran tumbuh 4,86 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tumbuh paling tinggi 12,48%, diikuti konsumsi pemerintah 6,61%, ekspor barang dan jasa 6,51%, serta konsumsi rumah tangga 4,94%. Pemerintah mempertahankan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, meskipun Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan akan berada di kisaran 4,7%-5,5% karena adanya risiko gangguan tarif baru dari AS. PDB adalah indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, berupa nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2023, PDB Indonesia mencapai sekitar 1371,17 miliar

dolar AS, yang mewakili sekitar 1,30 persen dari ekonomi dunia. Ini merupakan rekor tertinggi PDB Indonesia sejak 1967. (BPS, 2024)

2. KAJIAN PUSTAKA

Definisi pemerataan ekonomi adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara agar memiliki pendapatan minimum serta kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan secara adil dan merata. Pemerataan ini bertujuan agar manfaat pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, melainkan seluruh lapisan masyarakat secara luas. Teori Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita, perbaikan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan dalam masyarakat. Namun, pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang lebih besar di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerataan ekonomi menjadi penting untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan. (Boediono, 1999)

Teori Redistribusi Pendapatan. Teori pemerataan ekonomi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam redistribusi pendapatan melalui kebijakan seperti pajak progresif dan program sosial. Pendapatan dari pajak yang dikumpulkan dari kelompok berpenghasilan tinggi didistribusikan kembali untuk mendanai layanan publik dan program kesejahteraan sosial guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi kelompok kurang beruntung. (Mankiw, 2010)

Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi Pemerataan ekonomi juga berkaitan dengan konsep keadilan sosial, yaitu distribusi sumber daya yang adil untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih besar. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan pemerataan, masyarakat menjadi lebih harmonis dan lingkungan ekonomi menjadi kondusif untuk investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Indikator Pemerataan Ekonomi Indikator yang digunakan untuk mengukur pemerataan ekonomi antara lain koefisien Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan dasar. Upaya pemerataan ekonomi yang efektif dapat menurunkan kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum .(Todaro, 2009)

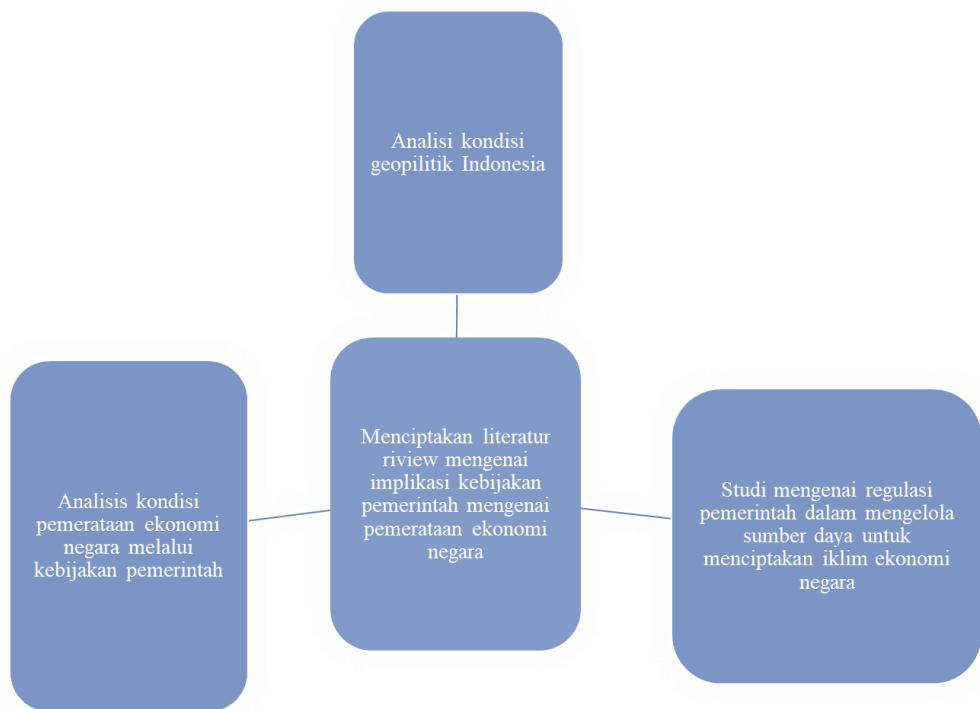
Pemerataan ekonomi yang diukur dengan indikator seperti koefisien Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Kebijakan redistribusi pendapatan dan peningkatan akses layanan dasar terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Studi mengenai pemerataan pembangunan ekonomi

di Indonesia menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah-daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerataan pembangunan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan stabilitas sosial-politik. Penelitian ini merekomendasikan peran aktif pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil. (Farathika, 2020).

pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor non-pertanian, dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain yang lebih produktif. dapat disimpulkan bahwa pemerataan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan pemerataan yang efektif mencakup redistribusi pendapatan, pembangunan infrastruktur merata, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. (Feriyanto, 2020).

Teori keuangan negara adalah kajian yang mempelajari bagaimana negara mengelola hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat menjadi milik negara dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai teori keuangan negara beserta sumber sitasinya. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Keuangan NegaraKeuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. (Nopirin, 2026).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Teori keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kebijakan negara di bidang ekonomi, khususnya mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta dampaknya terhadap perekonomian. Ruang lingkup keuangan negara meliputi pengeluaran negara, penerimaan negara, administrasi negara, serta stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Richard Musgrave dalam bukunya "The Theory of Public Finance", tugas negara dalam keuangan negara meliputi, Realokasi sumber daya ekonomi secara optimal, Redistribusi pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial, Stabilisasi perekonomian melalui kebijakan fiskal seperti APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Keuangan negara juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi inflasi dan deflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan anggaran negara. Pendekatan Teori Keuangan Negara Pendekatan objek dalam teori keuangan negara menekankan pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang menjadi milik negara. Pendekatan yuridis melihat ruang lingkup keuangan negara dari aspek hukum dan peraturan perundangan yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan keuangan. (Kemenkeu, 2023)

**Gambar 2.1. Peta konsep**

3. METODE PENELITIAN

Metodologi studi literasi atau studi literatur adalah metode penelitian yang menggunakan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumentasi, dan sumber pustaka lainnya. Metode ini melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pencarian, membaca, mencatat, hingga mengelola bahan pustaka untuk mendukung penulisan atau penelitian. Metodologi penelitian ini mencari dan mengumpulkan sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun dokumen lainnya. serta Memilih sumber yang relevan, terpercaya, mudah dipahami, dan terbaru agar informasi yang diperoleh valid dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Melakukan pencarian kata kunci, pencarian subjek, dan pengecekan kutipan untuk memastikan keabsahan dan relevansi sumber yang digunakan, Membaca secara kritis isi pustaka dan mencatat hal-hal yang mendukung rumusan masalah atau hipotesis penelitian kemudian Mengelola data yang telah dikumpulkan dan mendeskripsikan hasil kajian literatur secara sistematis dan terstruktur kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis dan sintesis data pustaka yang telah dikaji untuk memberikan landasan teori atau ide penelitian selanjutnya.

Lokasi dan Teknik Pengumpulan Data ini memanfaatkan berbagai media salah satunya adalah perpustakaan sebagai tempat utama pengumpulan data, baik perpustakaan universitas, perpustakaan nasional, atau perpustakaan digital, Internet sebagai sumber data tambahan yang

menyediakan berbagai literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang mendukung tema dan permasalahan penelitian. Kemudian menentukan jenis pustaka yang dibutuhkan (sumber primer dan sekunder, Mengorganisir dan mengkaji bahan pustaka yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Membaca, mencatat, dan mengelola bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan dalam analisis dan penulisan laporan penelitian. (Basuki, 2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Wilayah NKRI

Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. secara lebih rinci, otonomi daerah memungkinkan daerah tersebut mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk membuat peraturan daerah dan melaksanakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat lokal. (Rahmawati. 2020)

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan amandemen dari UU sebelumnya. Manfaat otonomi daerah antara lain, pelaksanaan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pembangunan daerahnya, kebijakan daerah menjadi lebih tepat sasaran karena memahami kondisi lokal, mendorong daya tarik investasi dengan keunikan daerah masing-masing. (Agustin, 2022)

Daya Saing Negara Kesatuan Republik Indonesia

Potensi Kelautan dan Perikanan sekitar 62% dari total wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, memberikan potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, panjang garis pantai Indonesia mencapai sekitar 81.000 km hingga 108.000 km, menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya laut, Nilai ekspor produk kelautan dan perikanan terus meningkat, misalnya pada 2022 nilai ekspor mencapai USD 4,09 miliar, naik 8,12% dari tahun sebelumnya. Potensi sumber daya alam wilayah darat. Potensi wilayah juga dipengaruhi oleh sumber daya alam seperti kondisi tanah, iklim, topografi yang memengaruhi pertanian dan kehutanan, sumber daya manusia di wilayah juga menjadi faktor penting dalam pengembangan potensi wilayah, termasuk pendidikan, pengetahuan pertanian, dan kesehatan masyarakat, sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor potensial utama di beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur,

Papua, dan Kalimantan Utara, sektor pariwisata juga memiliki potensi besar di wilayah seperti Bali dan DI Yogyakarta. Perkembangan. (Dewi A. K, 2023)

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama periode 2016-2019, produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat sekitar 4,8%, dengan angka produktivitas mencapai Rp 86,55 juta per tenaga kerja per tahun pada 2019) yang merupakan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir, namun, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di posisi kelima di antara negara-negara ASEAN, dengan produktivitas per tenaga kerja. sekitar USD 26.328 pada 2019 lebih rendah dibandingkan Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand, mayoritas tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, sopir angkot, dan tukang becak, yang memiliki produktivitas dan penghasilan rendah. Hal ini menyebabkan produktivitas nasional menurun meskipun tingkat pengangguran menurun. Tingkat produktivitas yang rendah menjadi salah satu alasan Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), karena produktivitas yang tidak mengalami lompatan signifikan selama 30 tahun terakhir, rendahnya tingkat kompleksitas ekonomi dan kurangnya fokus pada peningkatan keahlian tenaga kerja juga menjadi faktor penghambat produktivitas, Kompetensi buruh yang masih perlu ditingkatkan agar daya saing industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Pemerintah telah mengambil langkah seperti pembentukan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. (Hendrawan A, 2020).

Penerimaan Perpajakan

Total penerimaan perpajakan pada APBN 2024 ditargetkan sebesar Rp 2.309,86 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 869,50 triliun hingga saat ini, mencapai 37,64% dari target. Komposisi penerimaan pajak dalam negeri meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh): Rp 1.139,78 triliun (target), realisasi Rp 473,03 triliun (41,50% capaian).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Rp 811,37 triliun (target), realisasi Rp 282,34 triliun (34,80% capaian).
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp 27,18 triliun (target), realisasi Rp 1,91 triliun (7,01% capaian).

Total belanja negara dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,12 triliun, yang sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan, alokasi belanja meliputi: Belanja Pemerintah Pusat, termasuk belanja pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Insentif Fiskal, Tren dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada tahun 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.869,23 triliun, meningkat 8,9% dibanding tahun 2022, dan melebihi target APBN 2023 sebesar 108,8%.

Penerimaan pajak terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan pajak dalam negeri sebagai kontributor utama. (BPS, 2024)

Data PDB Sebagai Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dan proyeksi pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Data PDB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional menjadi dasar utama dalam membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan, (Suparmoko, M. 1991). Tren dan Proyeksi PDB Indonesia Terbaru Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% (y-o-y) pada kuartal I 2024, dengan nilai PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5.665,9 triliun dan harga konstan Rp3.264,5 triliun. Pertumbuhan PDB Tahun 2024: Sepanjang tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%, dengan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau sekitar USD4.960,3. Dasar Perhitungan: Data PDB digunakan sebagai dasar utama dalam membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan nilai total produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. PDB triwulan dan tahunan memungkinkan analisis sektor-sektor penyumbang pertumbuhan, sehingga dapat mengidentifikasi sektor mana yang perlu didorong untuk mempercepat pertumbuhan ke depan. Penyesuaian Kebijakan Pemerintah dan pelaku ekonomi menggunakan proyeksi PDB untuk menyesuaikan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi, agar target pertumbuhan dapat tercapai. Perbandingan Internasional, proyeksi PDB juga digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi Indonesia dengan negara lain di kawasan maupun global. (BPS, 2024). Proyeksi PDB Tahun 2025:

1. Pemerintah dan sejumlah lembaga memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia pada 2025 akan berada di kisaran 4,9% hingga 5%.
2. Bank Dunia memperkirakan rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia akan mencapai 5,1% per tahun untuk periode 2024-2026, didorong oleh belanja publik, investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil.
3. Proyeksi Bank Mandiri untuk 2025 adalah pertumbuhan PDB sebesar 4,93%, didukung pemulihan permintaan domestik dan sektor pertanian.

Indikator Yang Menjadi Tolak Ukur Kesejajeraan Masyarakat Indonesia

Pada 2022, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia mencapai 144,64 juta orang, naik 4,79 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2021-2022 tercipta 3,59 juta lapangan kerja baru di seluruh sektor ekonomi, Statistik Ketenagakerjaan Terkini, Karakteristik Ketenagakerjaan Sektor informal masih mendominasi, dengan sekitar 57,95% pekerja berada di sektor ini, Lapangan pekerjaan di Indonesia sangat beragam, mulai dari pekerja formal (pegawai, buruh) hingga pekerja informal (usaha sendiri, pekerja keluarga tanpa upah), Pertumbuhan lapangan kerja juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, di mana sebagian masyarakat terpaksa menerima pekerjaan apapun yang tersedia. Dalam tiga tahun terakhir

(2020–2022), jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 11,12 juta orang. Pemerintah sebelumnya menargetkan penciptaan 2 juta lapangan kerja baru per tahun, dan sepanjang 2015–2022, tercipta lebih dari 11 juta lapangan kerja baru. (Aini S, 2023).

Hal yang mempengaruhi jumlah distribusi pemerataan tenaga kerja adalah tingkat pendidikan berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun ajaran 2023/2024, Tingkat Pendidikan Penduduk Pada 2024, dari total penduduk Indonesia (275,36 juta jiwa), hanya 6,41% yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, Tingkat Pendidikan Penduduk Dari total penduduk Indonesia (2024: 275,36 juta jiwa), hanya 6,41% yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, Persentase pengangguran turun dari 5,86% (Januari 2025) menjadi 5,45% Target pengangguran terbuka pada 2025 adalah 4,8%–5,0%. dengan rincian dengan jumlah sekolah di Indonesia mencapai 436.707 unit. (BPS, 2024) Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah:

Tabel 1. Data Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat Lintas Sektor

1. Perdagangan: 980 ribu orang
2. Pertanian: 890 ribu orang
3. Industri pengolahan: 720 ribu orang

Sumber: BPS 2024

Tingkat Kesehatan Masyarakat. Kesehatan merupakan aset utama dalam menggerakan perputaran perekonomian negara maka kasus ini merupakan perhatian penting pemerintah dalam memenuhi kebijakannya maka perlu adanya alokasi kesehatan BPJS Kesehatan dapat diperoleh dari beberapa sumber resmi yang menyediakan data terkait kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan alokasi anggaran. Berikut ringkasan penting terkait data alokasi kesehatan BPJS, (Novitasari N, 2021).

Data Sampel BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan menyediakan data sampel yang besar dan komprehensif untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tahun 2024, BPJS Kesehatan merilis data sampel sebanyak 102,8 juta. Alokasi Iuran dan Anggaran Kesehatan BPJS, BPJS Kesehatan mengalokasikan iuran JKN untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang mencapai hingga Rp160 triliun. Alokasi anggaran kesehatan juga bersumber dari APBN pusat, dana dekonsentrasi, dan dana alokasi khusus (DAK), dengan APBN pusat menyumbang sekitar 60,45% dari total anggaran kesehatan, termasuk dana murni, penerimaan negara bukan pajak, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama dengan BPJS, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di seluruh provinsi di Indonesia, yang menjadi bagian dari alokasi pelayanan kesehatan peserta JKN, dengan demikian, BPJS Kesehatan berkomitmen menyediakan data

yang valid dan transparan untuk mendukung pengembangan sistem kesehatan nasional. Berikut adalah data jumlah pelayanan kesehatan antara lain adalah rumah sakit sepanjang tahun 2024: 15.236 unit, Puskesmas non rawat inap: 6.178 unit, Puskesmas rawat inap: 4.238 unit, Klinik teregistrasi: 31.856 unit, Apotek: 3.099 unit. (Kemenkes, 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah memegang peran krusial dalam mengendalikan mekanisme pasar untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah serta antar-golongan masyarakat, Pemerintah melakukan intervensi melalui alokasi anggaran yang terukur dan strategis, seperti belanja sosial, subsidi, dan investasi pada infrastruktur serta sumber daya manusia, guna mendorong pemerataan ekonomi. Transformasi belanja negara dari konsumtif ke produktif menjadi kunci agar anggaran tidak hanya menjadi beban, tetapi investasi jangka panjang yang meningkatkan daya saing nasional. Kebijakan desentralisasi fiskal dan pemberdayaan daerah juga menjadi respons penting, dengan memberikan kewenangan dan dukungan keuangan yang proporsional agar daerah dengan potensi ekonomi rendah dapat berkembang secara mandiri. Hal ini diharapkan mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Meski pertumbuhan ekonomi terus didorong, pemerintah menyadari bahwa efek pemerataan kesejahteraan baru dapat terlihat dalam jangka menengah hingga panjang. Oleh karena itu, konsistensi dan keberlanjutan kebijakan fiskal sangat penting untuk menurunkan ketimpangan secara efektif. Secara keseluruhan, respon terhadap kebijakan pemerintah melalui keuangan negara menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjalankan peran sebagai stabilisator dan penggerak pemerataan ekonomi dengan pendekatan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil demi kemakmuran rakyat secara luas.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh Pengangguran, Ipm, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. EKONIKA : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 7(2), 262–285. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2221>
- Aini, S. nur, & Nugroho, R. Y. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Trunojoyo, 4(1), 100–119.
- Alifah, K. I., dan Imaningsih, N. (2023). Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 12(1), 1. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1179>

- Alma'ruf, Z. (2023). The Effect of Economic Growth, Population, Minimum Wage, and HDI on Poverty. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 6(1), 107–117. <https://doi.org/10.15294/efficient.v6i1.55225>.
- Andina, Wida & Wahyudi, Amin. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, IAIN Ponorogo.Irfan, M., Nia Kania Kurniawati, and Tb. Ace Hasan Syadzily. 2018. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Serang." *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)* JIPAGS 15(1):83–93.
- Basuki. (2021). Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE
- BPS. (2024). Realisasi Pendapatan Negara Milyar Rupiah 2019-2024. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kemiskinan dan Ketimpangan. Diakses 2 Juni 2023 dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan. Diakses 2 Juni 2023 dari <https://www.bps.go.id/indicator/6/529/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atasmenurut-jenis-kegiatan.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Pengeluaran Per Kapita. Diakses 2 Juni 2023 dari <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html>.
- Dewi, A. K., dan Nurhayati, S. F. (2023). Analysis Effect of Human Development Index (HDI), Regency/City Minimum Wage (UMK), Investment and Unemployment Rate on the Number of Poor People in Bali Province in 2012- 2021. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(1), 95–102.
- Farathika. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipdm), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 101–113.
- Feriyanto, (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product in Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099.
- Hendrawan, A. (2020). Potensi Daerah Dan Daya Saing Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.154>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021. Ditjend Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Riset Kesehatan Dasar Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2024). p. 198. Available from: http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2024/Laporan_Nasional_RKD2024_FINAL.pdf
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023). Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi (online). Diakses pada 26 Juni 2025, di <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/15/L2-026500/2023/SD-1>.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar – Dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mankiw, N. Gregory. 2010. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.

Nopirin. 2016. Ekonomi Moneter. Jilid Pertama. Yogyakarta: BPFE

Novitasari, N. I., Suharno, S., & Arintoko, A. (2021). *Pengaruh Keluhan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur*. Vol. 21, No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2023).

Rahmawati. 2020. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. Digital Libary Admin

Saragih, Rizky Febrian, Purnama, Ramadani Silalahi, & Khairina, Tambunan. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. Vol 1 (2). H 74.

Suparmoko, M. 1991. Pengantar Ekonomika Makro. Yogyakarta: BPFE.Prawoto. (2019). Pengantar Ekonomi Makro. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Pers. ISBN : 978-623-231-118-3

Todaro, M.P. dan Smith S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: ErlanggaNugroho, Riant. 2021. *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.